**Dualisme Lembaga Pendidika di Indonesia**

**Suryoto 1, Munzir Hitami 2, Edy Yusrianto 3**

Pascasarjana PAI UIN Suska Riau 1,2,3

Email: **suryoto46@gmail.com**

**Abstrak**:

Istilah dualisme dan dikotomi memiliki makna yang sama yaitu pemisahan antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Dikotomi selalu melahirkan pandangan pembedaaan di satu sisi dan penyamaaan di sisi yang lain. Pandangan dikotomis pada hakikatnya mengabaikan esensi atau nilai sprit pendidikan. Membedakan dan menyamakan lebih dimaknai pada tataran permukaan sehingga jelas merusak nilai spirit dari pendidikan Islam. Dualisme dan dikotomi bukan hanya pada tataran pemilahan, tetapi telah masuk pada wilayah pemisahan yang dalam operasionalnya memisahkan mata pelajaran umum dari mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah yang pengelolaannya berjalan terpisah-pisah. Puncaknya pada pemerintah Orde Baru yang mengeluarkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 24 Maret 1975 yang menguatkan pemisahan itu hingga saat ini. Dampaknya terasa merugikan dan makna Islam menjadi sempit karena pengotak-kotakan ilmu akhirnya menomorduakan dan menganaktirikan pendidikan Islam. Sebagai solusi alternatif harus diikuti upaya integrasi pengetahuan serta reposisi, yaitu cara pandang yang ilmu-ilmu Islam pada posisi yang sebenarnya.

**Kata kunci:** Dualisme, Lembaga Pendidikan Islam

Abstract

*The terms dualism and dichotomy have the same meaning, namely the separation between general education and religious education. Dichotomy always gives rise to different views on one side and equality on the other. The dichotomous view essentially ignores the essence or value of the spirit of education. Differentiating and equating are more interpreted at the surface level so that it clearly damages the spirit value of Islamic education. Dualism and dichotomy are not only at the level of segregation, but have entered the area of separation which in practice separates general subjects from religious subjects, public schools and madrasas which are managed separately. The climax was when the New Order government issued a Joint Decree (SKB) on March 24, 1975 which confirmed the separation to date. The impact was detrimental and the meaning of Islam became narrower because the compartmentalization of knowledge ultimately subordinated and neglected Islamic education. As an alternative solution, efforts to integrate knowledge and repositioning must be followed, namely the perspective of Islamic sciences in their true position.*

***Keywords:*** *Dualism, Islamic Education Institutions*

**PENDAHULUAN**

 Tema yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia sejak masa dulu sampai sekarang adalah adanya dualisme lembaga pendidikan yang memperlihatkan pendidikan yang terkotak-kotak. Diakui atau tidak, dampak sosial dualisme pendidikan dapat menjadikan tingkat pengetahuan masyarakat terbelah-belah dan tidak utuh yang pada gilirannya terjadi penilaian yang berbeda terhadap pendidikan yang ideal sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka tempuh dan tekuni untuk setiap masanya sehingga terkesan dibatasi.

Jika dualisme dalam lembaga pendidikan tersebut dibiarkan berlangsung terus-menerus, akan melestarikan keterbelakangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Padahal, menurut catatan sejarah, kemajuan teknologi di barat sesungguhnya digali dari pengetahuan yang dibangun oleh orang-orang Islam yang hidup di mana tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum (Ali Riyadi, 2006).

Fenomena dualisme lembaga pendidikan dapat ditelusuri sejak masa penjajahan. Dualisme lembaga pendidikan di Indonesia sekarang ini dapat dikelompokkan ke dalam sekolah umum dan sekolah agama. Sekolah agama menciptakan sarjana agama yang pintar dalam ilmu syariah, tetapi tidak maksimal di ilmu umum. Begitu pula sebaliknya, seorang profesor kimia, kompeten di bidangnya, tetapi awam untuk urusan agama.

Menurut Abdul Rahman Al Segaf bahwa dari sudut pandang Islam, secara konseptual tidak dijumpai adanya dualisme ilmu. Jika kita menoleh terhadap pegangan Islam yakni al-Qur'an atau hadis, tidak ditemukan, baik secara tersirat maupu tersurat tentang dalil mengenai dualisme dalam pendidikan. Islam mengajarkan untuk menuntut semua cabang ilmu (Surohim, 2005).

Oleh karena itu, tulisan ini membahas dualisme pendidikan dan penyebab lahirnya. Demikian pula implikasi dari dualisme lembaga pendidikan di Indonesia dan bagaimana solusi yang untuk menyikapinya sehingga isu dalam pendidikan Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik.

**PEMBAHASAN**

**Pengertian Dualisme Pendidikan**

Perkataan “dualisme” adalah gabungan dua perkataan yang berasal dari bahasa Latin yaitu “dualis” atau “duo” dan “ismus” atau “isme”. “Duo” memberi arti kata dua sedangkan “ismus” berfungsi membentuk kata nama bagi satu kata kerja. Dualisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Secara terminologi, dualisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau paham yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu, dualisme ialah keadaan yang menjadi dua dan ia adalah satu sistem atau teori yang berdasarkan pada dua prinsip yang menyatakan bahwa ada dua substansi (Surohim, 2005).

Dalam konteks pendidikan, Marwan Sarijo menyatakan bahwa istilah dualis- me dan dikotomi memiliki makna yang sama yaitu pemisahan antara pendidikan umum dari pendidikan agama (Marwan Saridjo, 1996). Dengan pemaknaan di atas, dualisme dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan sistem pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan atau ilmu umum. Dualisme dan dikotomi ini, bukan hanya pada tataran pemilahan tetapi masuk pada wilayah pemisahan. Dalam operasionalnya, pemisahan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah yang pengelolaannya memiliki kebijakan masing-masing.

Meskipun dewasa ini system pendidikan Islam sudah dibenahi dan disempurnakan, namun dalam sistem kelembagaan masih dirasakan adanya dualisme dalam pendidikan, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama agaknya merupakan warisan dari pemikiran Islam klasik yang memilih antara ilmu umum dan ilmu agama atau ilmu ghirussy syari’ah dan ilmu syari’ah, seperti yang terlihat dalam konsep al-Ghazali tentang ilmu. Dualisme atau dikotomi dalam sistem pendidikan yang berlaku sekarang merupakan permasalahan yang harus menjadi pemikiran, bukan saja karena sampai saat ini belum ditemukan solusinya, melainkan juga semakin menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan yang semakin mencolok. Menurut Syafi’i Ma’arif, dikotomi pendidikan pada dasarnya akan melahirkan sosok manusia yang pincang (Ismi Adelia, 2021).

 Di Indonesia, bidang pendidikan ditangani oleh dua kementerian yakni Kemen- terian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta Kementerian Agama (Kemenag). Dalam pelaksanaannya, Kemen- terian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) membawahi lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi Umum. Sedangkan Kementerian Agama (Kemenag) mengurusi lembaga pendidikan dari RA MI, MTs, MA, hingga Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS). Hal tersebut memunculkan pemahaman adanya dualisme pendidikan, yakni adanya sekolah umum dan sekolah agama. Kedua lembaga penyelenggara pendidikan tersebut merupakan bagian sistem pendidikan nasional (Nurhayati Djamas, 2009).

 Berbagai analisa pakar pendidikan ada sinyalemen bahwa pendidikan nasional kita dewasa ini sedang dihadapkan pada berbagai krisis yang perlu mendapat penanganan yang cukup serius. Keadaan darurat tersebut (krisis pendidikan) dibuktikan dengan membawa fakta baru dari lapangan yang menampilkan data tentang rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Fasil Jalal dalam buku Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, menyatakan bahwa rendahnya mutu pendidikan selama ini antara lain disebabkan oleh kurikulum yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan. Kerangka pemikiran tersebutlah, pemerintah menggagas kurikulum baru yang diberi nama dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Melalui KTSP ini pemerintah berharap jurang pemisah yang semakin menganga antara pendidikan dan pembangunan serta kebutuhan dunia kerja dapat teratasi, dan sekarang bergulir Kurikulum Merdeka (Kumer) yang berorientasi pada kekhasan dan kearifan lokal lembaga pendidikan berada, semakin dominan dualisme lembaga pendidikan kita.

**Sejarah Dualisme Pendidikan Islam**

Bentuk dualisme lembaga pendidikan itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah, baik dari kebijakan dalam undang-undang pendidikan nasional maupun Peraturan Pemerintah. Pergumulan antara sistem pendidikan umum dengan sistem pendidikan Islam pun terus berlangsung.

 Secara historis diketahui bahwa sejak pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikannya yang bersifat sekuler, keadaan pendidikan di Indonesia berjalan secara dualistik. Pendidikan kolonial yang tidak memperhatikan nilainilai agama dengan pola baratnya berjalan sendiri, sementara pendidikan Islam yang diwakili pesantren dengan tidak memperhatikan pengetahuan umum juga berjalan sendiri. Hal ini berjalan sampai Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya, meskipun pada permulaan abad ke-20 sudah diperkenalkan sistem pendidikan madrasah yang berusaha memadukan kedua sistem tersebut di atas terutama dengan memasukkan pengetahuan-pengetahuan umum meskipun keteradisionalnya masih sangat kentara sekali (St. Rodliyah, 2013).

 Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan agama (Nurhayati Djamas, 2009). Keputusan itu diikuti oleh Inpres No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut. Keputusan ini mendapat tantangan keras dari kalangan Islam. Alasannya karena madrasah harus dikelola oleh Kemendikbud sebagai satu-satunya kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional (Maksum, 1999). Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres tersebut sebagai manuver untuk mengabaikan peranan dan manfaat madrasah juga dipandang sebagai langkah untuk mengurangi tugas dan peranan Kementerian Agama dan bagian dari upaya sekulerisasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Hal ini cukup beralasan dikaitkan dengan setting sosial politik yang berlangsung pada awal pemerintah Orde Baru yang menerapkan kebijakan politik yang memarjinalkan politik Islam melalui pengebirian partai politik Islam (Departemen Agama, 2004).

Munculnya reaksi keras dari umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan yang lebih operasional dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 24 Maret 1975, yang di- tandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama yaitu No. 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; dan No. 36 Tahun 1975. Inti dari ketetapan dari SKB Tiga Menteri ini adalah:

1. Agar madrasah untuk semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.

2. Agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas.

3. Agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama (Departemen Agama, 2004).

Pada kenyataannya, dualisme lembaga pendidikan di Indonesia sampai sekarang masih melingkupi pendidikan nasional. Kementerian Agama sebagai pemegang otoritas pengelolaan pendidikan agama berhadapan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) selaku pengelola pendidikan umum sehingga muncul persoalan-persoalan, yakni dualisme lembaga pendidikan di Indonesia.

Adanya dualisme dalam pendidikan yakni pendidikan umum dan pendidikan agama sampai sekarang masih tampak dalam UU RI No.20 tahun 2003 Bab VI, pasal 15 tentang Sisdiknas yang berbunyi: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi dan keagamaan”. Dari pasal tersebut tampak jelas terjadinya dualisme lembaga pendidikan agama dan pendidikan umum.

 Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi komplek, mulai dari konseptual-teoritis sampai dengan operasional praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan “kelas dua”. Sesungguhnya sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim namun dalam hal pendidikan selalu tertinggal dengan umat yang lainnya (Rasyidi dkk, 2021). Fenomena ini tampak lembaga pendidikan Islam dijadikan alternatif baga calon-calon pelajar yang akan melanjutkan studinya.

**Pandangan Islam Tentang Dualisme Pendidikan**

Ulama-ulama terdulu tidak pernah membedakan ilmu umum dan ilmu agama. Namun, menurut Muhamad Abduh, harus ada skala prioritas dimana ilmu agama perlu diajarkan pertama kali karena berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai orang beragama. Dia harus tahu hakikat agamanya supaya punya identitas, sistem moral yang kuat, dan visi yang jelas (Nasution, 2003).

Bukti bahwa ulama dulu tak pernah membedakan disiplin ilmu tertentu dapat dilihat dari otoritas keilmuan yang dikuasai ulama-ulama terdahulu. Ini mengindikasikan Islam sangatlah menjunjung tinggi keutamaan ilmu dari aspek keutuhan ilmu. Para tokoh muslim dan ulama terdahulu juga telah membuktikan kesatuan ilmu yang wajib dipelajari. Al-Kindi merupakan seorang filsuf sekaligus agamawan, begitu pula al-Farabi. Ibn Sina, selain ahli dalam bidang kedokteran, filsafat, psikologi, dan musik, beliau juga seorang ulama. Al-Khawarizmi adalah ulama yang ahli matematika, al-Ghazali, walaupun belakangan popular karena kehidupan dan ajaran sufistiknya, sebenarnya beliau telah melalui berbagai bidang ilmu yang diketahuinya, mulai dari ilmu fiqh, kalam, falsafah, hingga tasawuf. Ibn Rusyd, seorang ahli fikih yang mampu menghasilkan karya besarnya *Bidayat Al-Mujtahid*, mampu mengsinergikan filsafat dan ilmu fiqh. Ibn Khaldun dikenal sebagai ulama peletak dasar sosiologi mo- dern dalam karya besarnya *Al-Mukaddimah*, yang sampai sekarang banyak ahli yang mengkajinya, baik dari dari kalangan umat Islam maupun para orientalis (Abdul Wahab, 2012).

Jadi, dapat dikatakan bahwa ternyata ilmu orang dulu hampir tidak mengenal istilah dualisme ilmu karena bagi mereka semua aliran ilmu itu berada dalam satu atap bangunan pemikiran dan bersumber dari Allah, Dzat yang Maha Esa. Tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Semua saling terkait dan saling melengkapi.

Dualisme lembaga pendidikan adalah konsep yang sama sekali tidak dikenal dalam tradisi keilmuan salaf. Banyaknya ulama yang punya otoritas keilmuan lebih dari satu bidang adalah bukti kuat ulama kita tidak mengenal konsep dikotomi ilmu (Abd. Rahman Assegaf, 2005). Rasulullah saw sekalipun sebagai suri tauladan yang baik (*uswatun hasanah*), tidak pernah membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama karena semua ilmu datangnya dari satu Dzat, yaitu Allah swt. Apa yang diistilahkan orang-orang sekarang sebagai ilmu agama (ilmu-ilmu Islam teologi, tafsir, hadis, fikih, dll) dan ilmu-ilmu umum (ilmu sekuler), dalam pandangan Islam, pada batas tertentu, wajib dikuasai semuanya. Artinya, bagi setiap muslim wajib mempelajarinya.

Secara konseptual, menurut Abdul Rahman Al Segaf, dalam pendidikan Islam tidak dijumpai dualisme. Jika kita menoleh pegangan Islam yakni al-Qur'an ataupun hadis tidak ditemukan, baik secara tersirat terlebih lagi tersurat menemukan dalil mengenai dualisme ilmu atau pendidikan. Justru sebaliknya Islam mengajarkan untuk menuntut semua cabang ilmu (Ali Ashrof, 1993).

Hakikat tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia sebagai ‘abdi Allah atau hamba Allah. Pendidikan seharusnya bertujuan menciptakan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia yakni dengan berbagai latihan spiritual, intelektual, rasional, perasan bahkan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu, pendidikan semacam ini memerlukan suatu usaha dan pemikiran yang keras dan serius dalam upaya mewujudkan cita-citanya (Hasan Baharun, 2016). Karenanya, pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi pertumbuhan potensi manusia dalam segala aspek; spiritual, intelektual, imajinatif, fisikal, ilmiah, linguistik, dan lain-lain.) baik secara individual, masyarakat dan manusia pada umumnya (Ali Ashrof, 1993).

Akar masalah dualisme pendidikan di Indonesia adalah persoalan pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Menurut Dr. Mochtar Naim, dualisme pendidikan adalah penyebab utama dari kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Hal ini merupakan warisan dari kolonial Belanda (Abdul Wahab, 2012).

**Dampak dari Dualisme Pendidikan di Indonesia**

Munculnya dualisme pendidikan di Indonesia mempunyai dampak *image* yang negatif tentang:

1. Anti agama telah dipersempit yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah agama selama ini;
2. Sekolah agama telah terkotak dalam kubu tersendiri;
3. Sumber masukan sekolah agama dan Perguruan Tinggi Agama Islam umumnya berkemampuan rendah, maka mutu tamatannya adalah tergolong kelas dua;
4. Kegiatan keagamaan dan api keislaman di IAIN dan perguruan agama Islam kurang menonjol dan kurang dirasakan dibandingkan dengan perguruan tinggi umum (Al-Attas, 1994).

Dampak lain dari dualisme pendidikan adalah bahwa meskipun madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama secara institusi telah diakui oleh UUSPN No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, namun perwujudan makna pengakuan tersebut masih belum sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan mutu madrasah belum sebanding dengan anggaran yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Kemendikbudristek (Muslih Usa, 1991). Dengan perhatian pemerintah yang tidak seimbang antara kedua lembaga pendidikan tersebut, maka sangat logis bila kemudian mutu pendidikan Islam, khususnya madrasah berada di bawah pendidikan umum.

Dualisme dalam pendidikan di Indonesia diakomodir oleh undang-undang pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU RI tentang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI, pasal 15 yang berbunyi: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan”. Dari pasal tersebut tampak jelas terjadinya dualisme dalam pendidikan agama dan pendidikan umum. Di tingkat kelembagaan terjadi pemisahan antara perguruan tinggi agama seperti UIN Syarif Hidayatullah dan perguruan tinggi umum seperti ITB, UI dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadikan pendidikan Islam melalui madrasah, institut agama, dan pesantren dikelola oleh Kementerian Agama, sedangkan pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, dan kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Padahal, pendidikan Islam tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam, tetapi juga menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku yaitu membentuk manusia *islamis*.

**Solusi dalam menangani Dulaisme lembaga pendidikan di Indonesia**

Menurut Ramayulis, solusi untuk mengurangi atau meniadakan dualisme dalam pendidikan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam yaitu keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat (Ramayulis, 2010).

Al-Faruqi menawarkan islamisasi ilmu ke dalam pendidikan Islam dengan melebur dua sistem pendidikan; tradisional dan modern, menjadi sistem pendidikan yang berwawasan Islam. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan problem dualisme dalam sistem pendidikan. Ide tersebut berisikan suatu prinsip bahwa keilmuan barat tidak harus ditolak, artinya perlu diterima, tetapi harus melalui proses filterisasi yang disejalankan dengan nafas Islami agar tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist (Muhammad Fahmi, 2006).

Untuk memecahkan masalah dualisme pendidikan, menurut al-Faruqi, jalannya adalah melakukan islamisasi ilmu. Menurutnya, para akademisi Islam hendaknya memberi solusi melalui islamisasi ilmu (Muhammad Fahmi, 2006). Artinya, akademisi muslim harus menguasai semua disiplin ilmu modern, memahami disiplin tersebut dengan sempurna, dan merasakan itu sebagai perintah agama. Setelah itu, mereka harus mengintegrasikan pengetahuan baru tersebut ke dalam keutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai *world view* Islam dan menetapkan nilai-nilainya (Husni Rahim, 2005).

Selanjutnya mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama ke dalam satu sistem. Sebagai bagian dari proses pencarian rumusan sistem pendidikan nasional yang tunggal, pergumulan itu secara bertahap harus menghasilkan penyesuaian-penyesuaian yang signifikan. Tentu butuh proses yang panjang dan mungkin terjadi ketegangan politik di antara komponen yang berbeda pandangan.

Gagasan tentang pendidikan nasional di bawah satu atap berarti penghilangan "dualisme" penyelenggaraan pendidikan di Indonesia seperti yang dijalankan selama ini, sebenarnya bukan suatu hal baru. Pada masa Orde Baru, Mendikbud pernah mengemukakan gagasan ini yang berarti bahwa semua lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan, diurus di departemennya. Pada saat itu, gagasan ini mendapat reaksi keras dari kalangan pemimpin dan organisasi Islam, terutama karena pertimbangan politis, yakni kekhawatiran akan adanya proses sekuralisasi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Di samping itu, umat Islam yang pada waktu itu termarjinalisasi secara politis, berpikir bahwa keberadaan pendidikan keagamaan bukan hanya sekadar bentuk kelembagaan, tetapi juga merupakan simbolisme politik Islam di Indonesia.

Pada masa kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil dengan Gus Dur gagasan gagasan tersebut kembali diangkat. Memang Gus Dur tidak secara eksplisit menyatakan perlunya pendidikan nasional dalam satu atap, namun kebijakannya tentang perubahan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kemendiknas dapat menjadi indikasi ke arah penyatuatapan ini. Kali ini, gagasan penyatuan pendidikan nasional ini disambut biasa-biasa saja, dalam arti tidak ada penolakan keras maupun penerimaan dengan penuh kegembiraan. Tiadanya penolakan ini bisa jadi karena umat Islam sudah berada dalam *center of power* sehingga pendidikan keagamaan di bawah Kemenag bukan merupakan satu-satunya ekspresi simbolik politik Islam.

Sekolah Islam Terpadu secara total mengadopsi kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua mata pelajaran yang ada dalam kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepenuhnya “diterima” dan diajarkan dalam kurikulum Sekolah Islam Terpadu. Lima rumpun mata pelajaran yang ada dalam Undangundang Sistem Pendidikan Nasional yang terdiri dari rumpun mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, serta Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan merupakan bagian integral dari struktur kurikulum Sekolah Islam Terpadu. Bahkan diakui oleh para pendiri Sekolah Islam Terpadu, lima rumpun mata pelajaran tersebutmerupakan bagian dari ajaran Islam. Kelima rumpun mata pelajaran tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, mempelajari sains dan teknologi merupakan bagian pengabdian seorang hamba kepada Allah swt. Sekolah Islam Terpadu hanya menambah beberapa mata pelajaran dalam struktur kurikulumnya, yang dinamakan dengan program ke-Islam Terpaduan. Oleh karena itu, diintegrasikannya antara kurikulum pendidikan agama dan umum ditambah dengan program ke-IT-annya merupakan upaya untuk melakukan islamisasi kurikulum pendidikan (Suyatno, 2015).

Dengan demikian, wajah baru pendidikan Islam hendaknya berwujud pendidikan bermutu, di mana dualisme pendidikan di Indonesia harus diakhiri. Dualisme pendidikan hanya mengakibatkan persoalan-persoalan yang rumit. Islam tidak pernah mengotak-kotakkan ilmu, bahkan Islam memiliki konsep bahwa ilmu itu sumbernya satu, yaitu dari Allah swt., baik itu ilmu agama maupun ilmu umum.

**KESIMPULAN**

Penting untuk mempertimbangkan ide tentang islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu dalam pendidikan Islam berarti para akademisi muslim harus menguasai semua disiplin ilmu modern, memahami disiplin tersebut dengan sempurna, dan merasakan itu sebagai perintah agama. Setelah itu mereka harus mengintegrasikan pengetahuan baru tersebut ke dalam keutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai *world view* Islam dan menetapkan nilai-nilainya.

Solusi lainnya, dalam konteks pendidikan Islam, hendaklah dikembalikan nilai spirit pendidikan Islam dan jangan terjebak pada virus yang merusak nilai spirit tesebut. Tampilan permukaan bukanlah sesuatu yang menentukan keberhasilan spirit pendidikan Islam, tetapi upaya terhadap mengubah cara pandang untuk kemajuan mutlak harus dilakukan. Ada beberapa tahap agar bisa terealisasikan, yaitu perubahan orientasi pada nilai keagamaan yang sama, perubahan orientasi mencari status, dan perubahan orientasi cita-cita untuk masa depan. Perubahan orientasi pada nilai keagamaan yang sama maksudnya adalah cara pandang terhadap pendidikan Islam harus diukur atas dasar kesamaan atau kesetaraan antara institusi dengan muatan nilai yang ditawarkan. Misalnya lembaga pendidikan di bawah institusi kementerian agama dikatakan pendidikan yang ditawarkan sarat dengan pendidikan Islam sementara pendidikan umum di bawah pendidikan nasional bukan dikatakan pendidikan Islam. Pandangan seperti ini jelas harus dirubah. Pendidikan dikatakan sukses tidak bisa diukur berdasarkan banyaknya peserta didik yang mendatangi lembaga tersebut. Sehingga para penyelenggara dan pengelola pendidikan berbondong-bondong untuk mengejar status sekolah favorit.

Selanjutnya perubahan yang juga harus dilakukan adalah orientasi cita-cita masa depan. Orang Islam selalu berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Namun, cara pandang ini agar tidak selalu dikaitkan dengan kehidupan ekonomi saja. Namun, lebih luas meliputi semua dimensi kehidupan sehingga tidak terjebak pada komersialisme pendidikan yang pada akhirnya mengarah kepada paham materialistik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abd. Rahman Assegaf. (2005). *Pengantar dalam buku Pendidikan Islam Integratif*. Pustaka Pelajar.

Abdul Wahab. (2012). Dualisme Pendidikan di Indonesia. *Lentera Kehidupan*, *16*(2).

Al-Attas, S. M. al-N. (1994). *Konsep Pendidikan dalam Islam Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*. Mizan.

Ali Ashrof. (1993). *Horison Baru Pendidikan Islam*. Pustaka Firdaus.

Ali Riyadi. (2006). *Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*. Ar-Ruzz.

Departemen Agama. (2004). *Sejarah Madrasah, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Departemen Agama RI.

Hasan Baharun. (2016). Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Telaah Epistemologis*, *3*(2).

Husni Rahim. (2005). *Madrasah dalam Politk Pendidikan di Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.

Ismi Adelia. (2021). Permasalahan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Madrasah. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *21*(1).

Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Logos Wacana Ilmu.

Marwan Saridjo. (1996). *Bunga Rampa Pendidikan Agama Islam*. Amissco.

Muhammad Fahmi. (2006). *Konsep Pendidikan Isma’il Raji Al-Faruqi: Relevansinya bagi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Fakultas Filsafat UGM.

Muslih Usa. (1991). *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*. Tiara Wacana YogyaSudrajat.

Nasution, H. (2003). *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Bulan Bintang.

Nurhayati Djamas. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. PT Raja Gradindo Persada.

Ramayulis. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam* (VIII). Kalam Mulia.

Rasyidi dkk. (2021). Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indoensia. *Jurnal Literasiologi*, *6*(2).

St. Rodliyah. (2013). *Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. STAIN Jember Press.

Surohim, U. A. B. dan. (2005). *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam*. Safira Insan Press.

Suyatno. (2015). Sekolah Islam Terpadu dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal “Al-Qalam,”* *21*(1).